

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Fitriany (2016) meneliti tentang Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013). Dari hasil pengujian yang telah dilakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen aktiva pajak tangguhan saat ini dan perencanaan pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengelolaan.

Negara (2017) meneliti tentang Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. Hasil analisis ditemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba.

Pindiharti (2011) meneliti tentang Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan AkruaL Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). Hasil Penelitian ini menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan perusahaan melakukan praktik manajemen laba sedangkan, aktiva pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan

Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Keagenan

Menurut Anthony dan Govindarajan (1995), dalam Suranggane (2007:80), teori keagenan (*teory agency*) adalah *economic rational man* dan kontrak antara prinsipal dan agen. Teori Agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Hubungan kontraktual antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan lancar jika pemilik mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik guna meminimalisir konflik kepentingan merupakan inti dari teori agensi.

Pemisahan dalam pengelolaan perusahaan dari pemiliknya ditujukan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin. Tugas para *agent* adalah menjaga kepentingan perusahaan dan menjalankan manajemen perusahaan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. *Agent* merupakan perantara para pemegang saham dalam menjalankan pengelolaan perusahaan, sementara para pemegang saham hanya mengawasi kinerja para *agent*-nya dan memastikan bahwa para *agent* bekerja sesuai dengan fungsi, tugasnya, dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Kinerja manajemen dapat dilihat dari keberhasilannya dalam memaksimalkan laba perusahaan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup perusahaan.

2. Manajemen Laba

Scott (2012) menjelaskan tentang manajemen laba yang merupakan cara yang digunakan manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja dengan cara pemilihan kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara ilmiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Tujuan manajemen laba adalah untuk memenuhi harapan pihak eksternal, baik investor maupun kreditor. Pihak eksternal menginginkan agar perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik dan tidak mengalami kerugian (Hery, 2016:51). Secara umum ada beberapa faktor yang memotivasi individu atau badan usaha melakukan tindakan manajemen laba, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Motivasi Bonus

Dalam perusahaan, kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan salah satunya diukur dari pencapaian laba. Apabila dalam laporan keuangan tidak menunjukkan rugi (*minus*) dalam satu periode maka kinerja manajer bisa dikatakan baik. Dalam perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan bonus dan insentif sebagai *feedback* atau evaluasi atas kinerja manajer.

b. Motivasi Utang

Bagi pihak investor yang terpenting adalah mengenai modal yang disetor, dan bagi pihak kreditor menginginkan adanya jaminan pembayaran. Agar kreditor menginvestasikan dananya di perusahaannya, manajer harus menunjukkan kinerja

yang baik dari perusahaan untuk memperoleh hasil maksimal, yaitu pinjaman dalam jumlah yang besar.

c. Motivasi Pajak

Dalam perusahaan apabila laba yang diperoleh tinggi, maka pajak yang dibayarkan juga tinggi. Perusahaan menginginkan laba fiskal lebih rendah dari yang sebenarnya. Hal tersebut memotivasi manajer melakukan tindakan manajemen laba untuk melaporkan laba fiskal lebih rendah tanpa melanggar aturan perpajakan.

d. Motivasi Pergantian Direksi

Praktik manajemen laba biasanya dilakukan saat pergantian direksi atau *chief executive officer* (CEO). Hal tersebut dilakukan agar kinerja yang dilakukan terlihat baik pada saat terakhir menjabat. Motivasi yang mendorong adalah melakukan manajemen laba untuk memperoleh bonus yang maksimal pada akhir masa jabatan. (Sulistiawan, 2011:70)

Scott (1977) merangkum pola umum yang dilakukan dalam praktik manajemen laba, yaitu sebagai berikut :

1. Pola income minimization.

Income minimization dilakukan dengan memilih kebijakan yang dapat meminimalkan laba agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi pada tahun berjalan. Dengan cara melalui penghapusan aset tetap maupun melalui pengakuan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan.

2. Pola income maximization.

Pola income maximization bertujuan untuk memperoleh laba yang tinggi pada tahun berjalan dan tujuannya untuk memperoleh bonus yang besar. Dengan cara menunda pelaporan biaya-biaya periode tahun berjalan ke periode mendatang, pemilihan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, dan meningkatkan jumlah penjualan dan produksi.

3. Income smoothing

Income smoothing adalah pola manajemen laba dengan menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk meratakan jumlah laba yang dilaporkan dari satu periode ke periode berikutnya. Income smoothing dilakukan dengan cara mengatur waktu kejadian transaksi, memilih prinsip atau metode alokasi dan mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan yang bukan dari modal normal. Tujuan perataan laba diantaranya agar menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman kreditor dan menarik investor. (Hery, 2016:51)

Selain pola diatas juga ada beberapa teknik yang digunakan oleh manajer untuk melakukan manajemen laba. Teknik legal yang biasanya dijumpai dalam praktik manajemen laba dapat dikelompokkan ke dalam empat teknik, yaitu :

1. Mengubah metode akuntansi

Metode akuntansi merupakan pilihan-pilihan yang disediakan oleh standar akuntansi (*accounting choices*) dalam menilai aset perusahaan. Beberapa bentuk pilihan metode akuntansi antara lain sebagai berikut:

- a. Metode penilaian persediaan (First In First Out-FIFO, rata-rata tertimbang).
- b. Metode penyusutan aset tetap (garis lurus atau saldo menurun atau jumlah angka tahun atau unit produksi).
- c. Leasing (*capital lease* atau *operating lease*)
- d. Investasi pada obligasi (*trading securities, held to maturities securities, atau available for sale securities*).
- e. Penggunaan metode harga pasar atau nilai buku pada aset jangka panjang.
- f. Pembelian kembali saham perusahaan atau *treasury stock* (metode cost dan par)
- g. Pengakuan pendapatan (metode persentase penyelesaian, saat penjualan, dan saat penerimaan kas).

2. Membuat estimasi akuntansi,

Teknik ini dilakukan dengan tujuan memengaruhi laba akuntansi melalui kebijakan dalam membuat estimasi akuntansi. Beberapa bentuk estimasi akuntansi tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Estimasi dalam menentukan besarnya jumlah piutang tidak tertagih, baik dengan persentase penjualan maupun persentase piutang.
- b. Estimasi dalam menentukan umur ekonomis aset, baik aset tetap maupun aset tidak berwujud.
- c. Estimasi tingkat bunga pasar yang digunakan untuk mendiskonto arus kas pada masa mendatang untuk penilaian kewajaran aset yang tidak memiliki pembanding atau kewajaran obligasi.

3. Mengubah periode pengakuan pendapatan dan biaya.

Teknik ini dilakukan untuk mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan dan biaya dengan cara menggeser pendapatan dan biaya ke periode berikutnya agar memperoleh laba maksimum.

4. Mereklasifikasi akun

Pada bagian ini, dilakukan dengan memindahkan posisi akun dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi, sebenarnya laporan keuangan yang disajikan sudah sama, tetapi karena kelihaihan penyajiannya, laporan keuangan ini bisa memberikan dampak interpretasi yang berbeda bagi penggunaannya.

Sebagai contoh, terdapat sebuah perusahaan perdagangan yang sedang menawarkan dirinya untuk diakuisisi (dibeli oleh pihak lain). Agar nilai jualnya lebih baik dari nilai yang sebenarnya, mereka menggunakan teknik penjualan yang unik. Barang yang mereka jual ditawarkan dengan diskon 40%. Dengan demikian jika ada barang berharga invoice 100, penerimaan kasnya adalah 60. Secara akuntansi, nilai 40 ini akan diakui sebagai diskon penjualan sehingga nilai penjualan bersih perusahaan itu adalah 60, bukan 100.

3. Perencanaan Pajak

Kesadaran wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak masih tergolong rendah. Bahkan, ada kemungkinan wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari kewajiban pembayaran pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Menurut Santoso (1958) ada dua bentuk perlawanan pajak, yakni :

1. *Perlawanan Pasif*

Perlawanan pasif meliputi hambatan yang mempersulit pemungutan pajak hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dan masih lemahnya intelektual dan moral penduduk tentang sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

2. *Perlawanan Aktif*

Perlawanan Aktif meliputi usaha yang dilakukan wajib pajak dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus untuk menghindari pajak. Berkaitan dengan perlawanan aktif, beberapa cara yang digunakan untuk wajib pajak untuk menghindari pajak, yaitu:

- a. ***Tax Avoidance*** (penghindaran pajak) yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. ***Tax evasion*** (penggelapan/penyelundupan pajak) yaitu usaha yang tidak dapat dibenarkan (*illegal*) berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum. Tax evasion adalah kebalikan dari Tax Avoidance.
- c. ***Tax saving*** (penghematan pajak) yaitu usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah utang pajak dengan cara tidak membeli barang-barang yang terkena PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Perencanaan pajak adalah cara yang dilakukan oleh wajib pajak atau badan usaha sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya,

berada dalam posisi yang paling minimal. Dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak yang tepat menghasilkan beban pajak yang minimal dari penghematan pajak / penghindaran pajak yang dapat diterima dan bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima dan tidak akan ditolerir (Zain, 2003).

Secara umum indikator dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Selain itu juga sebagai pengendalian jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah dan meminimalisasi beban pajak yang terutang. Karena pajak juga mempengaruhi pengambilan keputusan dalam operasi perusahaan.

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh perusahaan apabila melakukan perencanaan pajak. Antara lain penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi; dan sebagai pengatur aliran masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan mengatur aliran masuk dan keluar perusahaan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan kas keluar saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran lebih akurat.

Selain terdapat manfaat dalam perencanaan pajak, secara umum terdapat tujuan pokok dari perencanaan pajak yang tepat. Tujuan perencanaan pajak antara lain: Meminimalisir beban pajak yang terutang; Memaksimumkan laba setelah pajak; Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus; dan memenuhi kewajiban pajak secara benar, efisien, efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam melakukan perencanaan pajak yang baik diperlukan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
2. Secara bisnis masuk akal
3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya: kontrak, invoice, faktur pajak, *Purchase Order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (*Delivery Order*). (Anwar, 2011:12)

Perencanaan pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus tax retention rate (tingkat retensi pajak), yaitu dimana menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan pada tahun berjalan (Wild et al., 2004).

$$TRR = \frac{\text{Net income it}}{\text{Pretax income (EBIT)it}}$$

Keterangan :

TRRit = Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t

NET INCOMEit = laba bersih perusahaan i pada tahun t

PRETAX INCOME = laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t (EBITit).

4. Aset Pajak Tangguhan

Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan selain harus berdasarkan SAK, laporan keuangan perusahaan atau laporan keuangan komersial harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu untuk memenuhi tujuan perpajakan dan menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi komersial dan fiskal serta perbedaan kebijakan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu perbedaan tetap dan perbedaan sementara yaitu:

1. Beda tetap / Permanen

Perbedaan tetap (*permanent difference*) timbul sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak / fiskal. Akibat dari perbedaan ini berakibat juga pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar menghitung pajak yang terutang (Waluyo, 2010:234). Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal – hal berikut dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak :

1. Penghasilan dikenakan pajak final
2. Biaya yang tidak boleh dikurangkan:
 - Biaya entertainment yang tidak ada bukti pendukung
 - Sumbangan
 - Biaya yang tidak terkait untuk memperoleh, mendapatkan dan memelihara penghasilan
3. Penghasilan bukan obyek pajak
 - Laba anak perusahaan
 - Hibah

2. Beda Waktu / Temporer

Perbedaan temporer dimaksud sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak dari suatu aset atau kewajiban dengan nilai tercatat pada aset atau kewajiban yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah atau berkurang pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi atau dibayar. Perbedaan ini berakibat harus diakuinya aset dan atau kewajiban pajak tangguhan (Waluyo, 2010:234). Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal :

- Depresiasi / amortisasi mencakup metode, jangka waktu, nilai sisa
- Biaya yang diestimasi : penyisihan piutang, penyisihan persediaan, manfaat pensiun

Menurut Waluyo (2014) aset pajak tangguhan adalah selisih jumlah pajak yang dibayar melebihi jumlah pajak terutang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan & akibat adanya saldo kerugian yang dikompensasikan pada periode mendatang. Aset pajak tangguhan disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat :

- a. Perbedaan temporer dapat dikurangkan
- b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi: dan
- c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan mengizinkan. PSAK 46 (2014:46.2)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan selama besar laba kena pajak akan tersedia, sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan dari transaksi kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak), serta *goodwill* yang timbul dalam kombinasi bisnis lebih rendah dari DPP. PSAK 46 (2014:46.2)

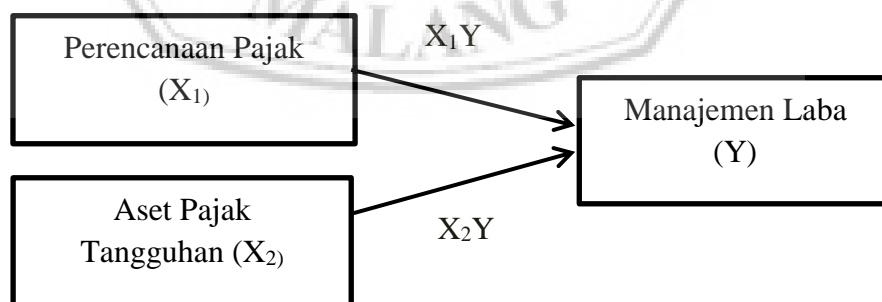
Aset pajak tangguhan dapat diukur dengan perubahan nilai aktiva pajak tangguhan pada akhir periode t dengan t-1 dibagi dengan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode pada t-1.

Rumus :

$$\text{APT it} = \frac{\Delta \text{Aset pajak tangguhan t-1}}{\text{Aset pajak tangguhan t-1}}$$

C. Kerangka pemikiran

Gambar 2.1



Hubungan Antara Variabel Penelitian

D. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh perencanaan pajak terhadap Manajemen Laba

Untuk melakukan manajemen pajak salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan cara perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan perusahaan dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayarkan, meminimalisir beban pajak terutang dan memaksimalkan laba setelah pajak. Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang. Jika biaya bunga hutang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan hutang untuk pendanaan guna mendapatkan benefit berupa biaya bunga hutang. Biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba. Selain itu intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan untuk berinvestasi dalam aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak.

Santana (2016) meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba, sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan hasil menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Astutik (2016) dengan judul pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini disebabkan karena perusahaan sudah mampu mengelola manajemen pajak dengan baik. Manajemen pajak merupakan cara untuk memenuhi kewajiban pajak secara benar.

Berdasarkan uraian di atas dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut

H₁: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2. Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan terjadinya aset pajak tangguhan. Dengan adanya aset pajak tangguhan jika penghasilan sebelum pajaknya lebih kecil dari pada penghasilan kena pajaknya, maka beban pajaknya lebih kecil dari pada pajak terhutangnya. Aset pajak tangguhan dapat dihitung dengan cara mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku pada saat perbedaan tersebut.

Dalam PSAK No.46 menyebutkan bahwa nilai tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali (pada tanggal neraca). Dimana perusahaan harus menurunkan nilai tersebut apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan pertimbangan manajemen dalam menilai saldo aset pajak tangguhan dan cadangan aset pajak tangguhan. Sedangkan penilaian

manajemen untuk menentukan saldo cadangan aset pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif. Hal ini memicu terjadinya manajemen laba karena setiap tahun manajer harus membuat penilaian untuk menentukan apakah akan mencatat atau akan menyesuaikan aset pajak tangguhan dan besarnya penyisihan aset pajak tangguhan. Selain itu, karena tidak adanya rumus pasti untuk menentukan besarnya penyisihan aset pajak tangguhan, maka manajer memiliki kebebasan dalam penentuan besarnya penyisihan aset pajak tangguhan.

Berdasarkan penelitian Suranggane (2007) bahwa aset pajak tangguhan dijadikan sebagai indikator dari praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspektasikan adanya peranan antara aset pajak tangguhan yang dapat dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba.

Jika jumlah aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*), untuk itu dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₂: Aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan.